

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta telah dibahas dalam Bab IV dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, penerapan kebijakan asimilasi oleh Pemerintah Orde Baru sesungguhnya sangat berkaitan dengan dengan unsur kepentingan politik dan polarisasi politik yang berjalan pada saat itu. Hal tersebut dapat ditinjau dari sejak lahirnya ide asimilasi di kalangan tokoh Tionghoa yang tergabung dalam golongan asimilasionis menginginkan tercapainya pembauran total antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Ide asimilasi dianggap sejalan dengan pola politik yang dimiliki Pemerintah Orde Baru, maka dari itu sejak awal golongan asimilasionis mendapat dukungan dari Angkatan Darat dalam melawan rivalnya yaitu Baperki yang memiliki ide integrasi serta dekat dengan PKI, dan pada akhirnya ide asimilasi secara resmi dijadikan kebijakan negara. Tujuan dari kebijakan asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah untuk melakukan pembauran secara total terhadap etnis Tionghoa di Indonesia untuk mencapai keharmonisan antara kelompok mayoritas dan minoritas, yang memerlukan integrasi atau penggabungan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya seperti dalam bidang sosial dan budaya. Asimilasi dalam bidang sosial budaya menjadi salah satu kekuatan pemerintahan Orde Baru dalam menyelesaikan permasalahan Tionghoa di Indonesia, karena bidang ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap identitas dan eksistensi budaya Tionghoa di Indonesia. Pemerintah dan lembaga pendukung gagasan asimilasi meyakini bahwa dengan mengasimilasi sosial budaya etnis Tionghoa maka asimilasi secara utuh akan mudah tercapai. Oleh karena itu, pemerintah secara perlahan menerapkan kebijakan asimilasi ini di bidang sosial budaya, antara lain yaitu kebijakan penggantian nama, kebijakan media yang melarang penggunaan aksara dan Bahasa Mandarin di dalam surat kabar,

nama toko atau perusahaan, dan kebijakan dalam agama, kepercayaan dan adat istiadat etnis Tionghoa.

*Kedua*, sebagai alat kebijakan asimilasi pemerintahan Orde Baru, dapat dikatakan bahwa model implementasi kebijakan tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan bersifat diskriminatif. Pasalnya, penerapan kebijakan asimilasi yang diwarnai unsur politik juga menimbulkan akibat lain yaitu adanya perasaan diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa berdasarkan kebijakan, aturan, dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh etnis Tionghoa dalam rangka melaksanakan aturan pemerintah untuk melakukan asimilasi total terhadap kehidupan masyarakat Pribumi. Secara tidak langsung, diskriminasi belum sepenuhnya terhapus pada masa pemerintah Orde Baru ini. Selain karena untuk terciptanya asimilasi total, pemerintah menggunakan kebijakan asimilasi ini sebagai media pengawas gerak-gerik etnis Tionghoa di Indonesia. Pada awalnya kebijakan asimilasi hanya mencakup bidang sosial dan budaya dan pendidikan saja, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966 yang menetapkan peraturan ganti nama sebagai langkah awal penerapan kebijakan asimilasi, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya kebijakan pada media massa dan agama, kepercayaan dan adat istiadat yang melarang etnis Tionghoa untuk menunjukkan identitas agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya di ruang terbuka. Dengan tujuan untuk mencapai pembauran total, maka dalam pelaksanaannya cakupan kebijakan asimilasi lambat laun semakin meluas, yaitu tidak hanya berfokus kepada bidang sosial budaya, akan tetapi diterapkan pada hampir seluruh bidang kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan tertutupnya ruang gerak etnis Tionghoa dalam berbagai bidang, kedudukan mereka terbatas serta hanya bisa melakukan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah meskipun hal tersebut di satu sisi menjadi beban bagi kehidupan mereka.

*Ketiga*, dalam penelitian ini, kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru tentunya memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya dalam ranah sosial budaya mengenai identitas etnis Tionghoa. Dengan segala kebijakan yang dibuat terhadap etnis Tionghoa, pelarangan kebijakan asimilasi ini akan menimbulkan krisis identitas bagi etnis Tionghoa itu sendiri, artinya

Revina Putri Felissa, 2024

**DAMPAK KEBIJAKAN ASIMILASI MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TERHADAP PERKEMBANGAN IDENTITAS SOSIAL BUDAYA ETNIS TIONGHOA TAHUN 1966-1998**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengubah identitas etnis Tionghoa juga dapat menghapus identitas budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit generasi etnis Tionghoa yang hidup pada masa Orde Baru yang mengetahui dan memahami budaya nenek moyangnya, terutama dalam hal Bahasa dan agama. Hal itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah Orde Baru yang mengabaikan manfaat berkembangnya budaya etnis Tionghoa. Dengan demikian, kebijakan asimilasi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru menyebabkan terkikisnya budaya etnis Tionghoa dalam lingkup sosial budaya dalam jangka panjang. Kebijakan yang awalnya ingin mengasimilasikan etnis Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia hanya pada bidang sosial budaya saja, tetapi akhirnya diterapkan pada hampir seluruh aspek kehidupan etnis Tionghoa, sehingga kebijakan tersebut justru menyebabkan tertutupnya ruang gerak etnis Tionghoa di berbagai bidang. Akibat kebijakan ini, pengikisan budaya tidak bisa dihindari. Pengikisan budaya ini menyebabkan kaburnya identitas etnis Tionghoa, bahkan mereka tidak memiliki identitas etnis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hubungan antara etnis Tionghoa dan masyarakat Pribumi menjadi tidak harmonis ketika diterapkan kebijakan asimilasi tersebut. Meski tidak dapat dipungkiri di beberapa daerah di Indonesia, proses asimilasi ini berjalan dengan baik seperti yang terjadi di Pulau Jawa. Meskipun dari kebijakan asimilasi tersebut timbul berbagai dampak negative, tetapi terdapat dampak positif juga dari penerapan kebijakan asimilasi tersebut yaitu secara tidak sadar mereka telah melakukan proses pembauran secara alamiah dengan masyarakat pribumi secara berangsur-angsur dan terbentuknya identitas yang sama antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi yaitu identitas warga negara Indonesia. Hal tersebut lambat laun menimbulkan adanya rasa "*sense of belonging*" sebagai warga negara Indonesia dalam diri individu Tionghoa yang melakukan asimilasi atau pembauran tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri jika dampak negatifnya lebih dominan pada hasil implementasi kebijakan asimilasi tersebut.

Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ini ialah pemerintah serta masyarakat memiliki andil dalam menciptakan keselarasan hidup agar terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa, serta adanya perbedaan dari setiap etnis atau golongan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menimbulkan konflik, namun sebagai simpul kuat

Revina Putri Felissa, 2024

**DAMPAK KEBIJAKAN ASIMILASI MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU TERHADAP PERKEMBANGAN IDENTITAS SOSIAL BUDAYA ETNIS TIONGHOA TAHUN 1966-1998**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

untuk bersama-sama membangun bangsa. Sikap diskriminasi memang sudah seharusnya ditinggalkan dari kehidupan bernegara agar tercapainya keadilan sosial sesuai dengan butir Pancasila ke 5.

## **5.2 Rekomendasi**

Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diantaranya :

### **1. Bagi Dunia Pendidikan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dalam penulisan Sejarah Indonesia khususnya pada masa Orde Baru. Terlebih lagi, para guru-guru di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas hendaknya tidak hanya fokus pada apa yang disampaikan dalam buku text saja, namun kita juga harus bisa mengambil hikmah dari suatu kejadian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kepada peserta didik dengan mempelajari tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih menghargai perbedaan yang ada dan menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu, seperti adanya prasangka buruk terhadap orang lain, golongan atau suku, yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan bangsa.

### **2. Bagi Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam materi perkuliahan di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia khususnya dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi, serta dapat menambah pengetahuan dan memperkaya penulisan Sejarah Indonesia mengenai kebijakan pada masa Orde Baru terutama kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

3. Bagi SMA/MA/Sederajat

Hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai sumber bacaan referensi pada mata pelajaran sejarah di tingkat SMA/MA/Sederajat. Penggunaan hasil dari penelitian ini sebagai sumber bacaan dan referensi dapat digunakan khususnya pada mata pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII dengan Kompetensi Dasar 3.7 mengenai mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia, terutama mengenai materi krisis sosial yang terjadi kepada etnis Tionghoa pada masa Orde Baru.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pembaca yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan topik yang sama, peneliti menyarankan untuk mengambil mengenai tokoh-tokoh Tionghoa yang ikut serta dalam memperjuangkan asimilasi etnis Tionghoa di Indonesia, karena peneliti banyak menyebutkan mengenai tokoh-tokoh tersebut namun peneliti tidak membahasnya terlalu dalam seperti tokoh Siauw Giok Tjhan yang merupakan ketua dari organisasi Baperki, lalu ada Yap Thiam Hien yang merupakan wakil ketua dari organisasi Baperki, Harry Tjan yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Front Pancasila serta konglomerat-konglomerat yang merupakan keturunan Tionghoa di Indonesia. Perjuangan tokoh-tokoh Tionghoa ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya ketika ingin membahas topik serupa. Selain itu, untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dapat melalui wawancara, karena bagi peneliti penjelasan yang diberikan dalam skripsi ini masih bersifat umum dan jauh dari kata sempurna. Dengan menggunakan wawancara dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat memperoleh fakta-fakta berupa cerita yang berdasarkan dari pengalaman narasumber yang belum di bahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.